



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN SOLOR SELATAN**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2012 - 2016**

KECAMATAN SOLOR SELATAN

2012



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN SOLOR SELATAN
K A L I K E

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SOLOR SELATAN
NOMOR : 02 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
KANTOR KECAMATAN SOLOR SELATAN
TAHUN 2012 – 2016

CAMAT SOLOR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa penyusunan rencana pembangunan Tingkat Kecamatan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dan untuk menunjang kesinambungan serta kelancaran pembangunan di Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur, perlu menyusun Rencana Strategis Kecamatan Solor Selatan Tahun 2012 – 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kecamatan Solor Selatan tentang Rencana Strategis Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur 2012 -2016.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Uusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat;
10. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 51/Kep/HK/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 – 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Rencana Strategi Kantor Camat Solor Selatan yang digunakan adalah Rencana Strategi Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2012 – 2016
- Kedua :** Rencana Strategi Kantor Camat Solor Selatan Tahun 2012 – 2016 mempunyai maksud dan tujuan yaitu :
1. Maksud Penyusunan Rencana Strategi Kantor Camat Solor Selatan adalah
 - a. Agar Kecamatan memiliki Dokumen Rencana yang berisi Visi dan Misi, Bidang – bidang Strategis, Program Kerja dan Rencana Kegiatan.
 - b. Memadukan dan menyerasikan RPJMD Kabupaten Flores Timur dengan Perencanaan Strategi Kecamatan.
 - c. Agar Kecamatan mempunyai rencana yang terarah dan berkesinambungan sesuai Visi dan Misi Kabupaten.

2. Maksud Penyusunan Rencana Strategi Kantor Camat Solor Selatan adalah
- Meningkatkan kemampuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas / perencanaan sebelumnya.
 - Tersedianya Rencana Strategi Kecamatan dalam satu jangka waktu tertentu sebagai satu kesatuan atau Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.
 - Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang berkesinambungan.
 - Tersusunnya Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan yang akan menjadi Pedoman Kegiatan Tahunan di Tingkat Kecamatan.

Ketiga : Sistematika penyusunan Renstra Kecamatan Solor Selatan sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan. |
| BAB II | Gambaran Pelayanan Kantor Camat Solor Selatan |
| BAB III | Isu – isu Strategi berdasarkan tugas dan fungsi |
| BAB IV | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan |
| BAB V | Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif |
| BAB VI | Indikator Kinerja Kantor Camat Solor Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Flores Timur |
| BAB VII | Penutup |

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Tahun 2012 Kantor Camat Solor Selatan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kalike

Pada tanggal : 28 Februari 2012

Pj. CAMAT SOLOR SELATAN

Yoseph Damian Klodor, S.Sos.
NIP.: 19660220 199903 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan dan penyertaanNya, maka dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Solor Selatan dapat disusun dengan baik sesuai rencana.

Secara konstitusional Renstara ini merupakan dokumen perdana bagi Kecamatan Solor Selatan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Solor Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Sejalan dengan ketentuan Undang – Undang tersebut, maka sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Flores Timur, Kantor Camat Solor Selatan harus memiliki Rencana Strategis yang mengandung Visi dan Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai karakteristik pemerintahan dan masyarakatnya. Oleh karena itu dalam Rencana Strategis Kantor Camat Solor Selatan ini memuat evaluasi pelaksanaan tugas sebelumnya, gambaran umum dan variasi cakupan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah agar Kecamatan mempunyai rencana yang terarah dan berkesinambungan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten sesuai Visi dan Misi.

Oleh karena, Renstra ini merupakan Renstra yang pertama untuk Kecamatan Solor Selatan maka kami menyadari masih banyak kekurangan, namun demi meningkatkan komitmen bersama terhadap proses pembangunan di Kecamatan Solor Selatan yang lebih baik maka kami berharap Renstra ini dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Flores Timur atas pendampingannya dan secara istimewa kepada Tim Kecamatan serta seluruh Staf Kantor Camat Solor Selatan yang selalu berupaya melakukan hal terbaik dalam penyusunan Renstra Kecamatan Solor Selatan Tahun 2012 – 2016.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat terhadap arah kebijakan, Program dan Kegiatan di Tingkat Kecamatan Solor Selatan.

Terima Kasih.

Kalike, Februari 2012

Pj. CAMAT SOLOR SELATAN

Yoseph Damian Klodor, S.Sos.
NIP.: 19660220 199903 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menjadi titik balik perubahan yang fundamental dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang tersebut peran Pemerintah Pusat terhadap berbagai aspek Pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat adalah sangat dominan, sementara dilain pihak aspirasi dan partisipasi masyarakat daerah kurang diperhatikan.

Pada saat ini kondisi tersebut telah berubah, Pemerintah Daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhususan serta potensi daerah.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah ini menuntut Pemerintah Daerah mampu menyusun program pembangunan yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta kemampuan daerah. Program pembangunan yang disusun harus sinkron dengan program pembangunan propinsi dan pusat, seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

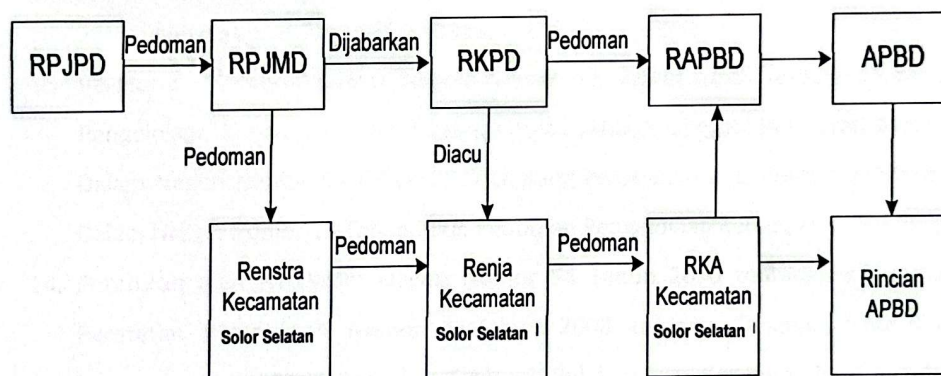
Kecamatan merupakan salah satu instansi teknis di daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kecamatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya menyusun kebijakan dan program pembangunan di Kecamatan secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang dan pelaksanaan otonomi di daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Solor Selatan Tahun Anggaran 2012 - 2016 merupakan Implementasi dari Rencana Strategi Kecamatan Solor Selatan dan merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya dan merupakan bagian dari upaya merealisasikan misi Kecamatan Solor Selatan dalam satu waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Solor Selatan merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) SKPD tahunan.

Rencana Strategis ini posisinya sangat strategis yaitu sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD/Kecamatan Tahunan selama 5 (lima) tahunan. Disamping itu dokumen ini juga sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) baik tahunan maupun lima tahunan untuk mengukur tingkat capaian kinerja SKPD antara rencana capaian kinerja dalam Renstra dengan riil realisasi capaian kinerja yang ada.

Alur pikir penyusunan Renstra Kecamatan Solor Selatan Tahun 2012 - 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Hubungan Renstra Kecamatan Solor Selatan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 ttg Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;

18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 – 2016.
20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor tahun 2012 tentang Uraian Tugas Kecamatan;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Solor Selatan adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi dan tujuan Kecamatan Solor Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu dan menyelaraskan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.
2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan dan tahunan yang akuntabel dan transparan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Solor Selatan adalah :

1. Sebagai dokumen rencana untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Kabupaten di bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati pada tingkat kecamatan;
2. Sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh sumber daya Kecamatan, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan Solor Selatan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan

kelompok sasaran program dan kegiatan, yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi,

4. Menyediakan suatu acuan resmi bagi aparatur Kecamatan dalam menentukan prioritas program lima tahunan dan kegiatan tahunan, pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta menyediakan indikator-indikator yang dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan antara proses dan hasil (outcome) yang dicapai.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam mencapai tujuan, disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur Kecamatan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Solor Selatan 2012-2016 adalah sebagai berikut:

1. Bab1. Pendahuluan

Memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;

2. Bab 2. Gambaran Pelayanan SKPD

Memuat tugas pokok dan fungsi, ketersediaan sumberdaya aparatur, kondisi dan kinerja pelayanan perencanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur, peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan

3. Bab 3. Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Memuat analisis permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya; tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi; faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW; sehingga diperoleh informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

4. Bab 4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Memuat Visi dan Misi lembaga, perumusan sasaran/target serta keterkaitan Misi, Kebijakan dan Strategi implementasinya sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Solor Selatan, serta strategi dan kebijakan kedepan untuk perencanaan pembangunan

5. Bab 5. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

6. Bab 6. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,

Memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7. Bab 7. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

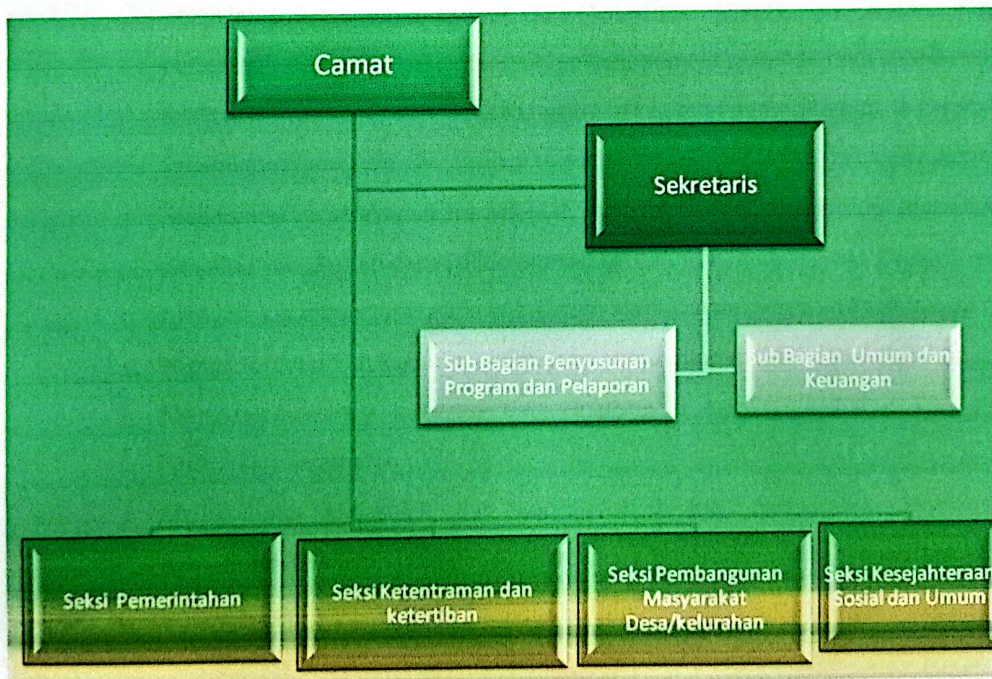
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SOLOR SELATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Flores Timur sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Kantor Kecamatan Solor Selatan sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;

(2) Struktur Organisasi Kecamatan :



Berdasarkan pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan, Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat oleh Bupati di wilayah kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat mempunyai :

1. Fungsi :

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman ketertiban umum dan pembangunan.
- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan.
- d. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

2. Tugas :

- a. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- d. Menyelenggarakan tata usaha kecamatan Perencanaan kegiatan Kecamatan
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- f. Mengkoordinasikan integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.;
- g. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

3. Tugas Sekretaris Kecamatan :

- a. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat atau aparatur kecamatan;
- b. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja kecamatan ;
- c. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan ;
- d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta melaksanakan pelayanan publik ;
- g. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventaris;
- h. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan kegiatan;
- i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat.

4. Tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan:

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka menyusun program kerja, rencana kerja dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana serta penyusunan produk hukumnya;
- c. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan kecamatan ;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program kerja dan rencana kerja kecamatan ;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja ;
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

- c. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran kecamatan, mengurus pembayaran gaji, keuangan, perjalanan dinas dan keuangan lainnya serta menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - d. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan kecamatan;
 - e. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
 - f. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
 - g. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Tugas Kasi Pemerintahan :
- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
 - b. Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - c. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
 - d. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Solor Selatan, peningkatan kedisiplinan perangkat desa, pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
 - e. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan organisasi sosial politik dan kemasyarakatan, ideologi negara dan kesatuan bangsa serta membantu pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - f. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
 - g. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan di bidang tata pemerintahan ;

- h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

- a. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta kegiatan perlindungan masyarakat;
- c. Melaksanakan penertiban dalam rangka menegakkan Peraturan daerah serta ketentuan dan peraturan perundangan lainnya ;
- d. Melaksanakan pengamanan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk dalam penjaag rumah jabatan camat ;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dengan kepolisian, tentara dan pemuka Flores Timur mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan ;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjsama dengan instansi terkai, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis

masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);

- e. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Tugas Kasi Kesejahteraan Sosial dan Umum :

- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan umum;
- b. Menghimpun dan mengolah data dan bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- c. Menyusun program dan mengadakan pembinaan dan penyuluhan di bidang kesejahteraan sosial yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga dan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- d. Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi didalam kehidupan sehari-hari;
- e. Membanstu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. SUMBER DAYA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Solor Selatan memiliki sumber daya manusia dan asset/modal sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur, akhir tahun 2011, adalah sejumlah 17 orang. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 di halaman berikut :

Tabel .2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Solor Selatan
Berdasarkan Golongan Tahun 2011

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV	1	
2.	III	8	
3.	II	7	
4.	I	--	
5.	Honorer	1	Operator Komputer
	Jumlah	17	

Sumber : Kecamatan Solor Selatan 2011

Dilihat dari sisi kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan data eksisting tingkat pendidikan aparatur, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Solor Selatan
Menurut Pendidikan Tahun 2011

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SLTA	11	
2.	D III	1	
3.	S1	5	
4.	S2	-	
	Jumlah	17	

Sumber : Kecamatan Solor Selatan 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur pada Kecamatan Solor Selatan belum memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi .

Prasarana dan sarana pendukung pelayanan tugas dan fungsi Kecamatan Solor Selatan yang tersedia memadai sangat membantu aktivitas pelayanan yang cepat,

tepat dan memadai. Kondisi prasarana dan sarana pendukung berupa : tanah, gedung kantor dan sarana penunjang lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kondisi Asset/Modal Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur

No	Asset/Modal	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah	...m ²	√			
2	Gedung Kantor	-				Belum ada
	Rumah Dinas Camat	-				Belum ada
3	Prasarana dan Sarana Penunjang					
	1. Sepeda Motor	1	√			
	2. Komputer	1		√		
	3. Laptop	1	√			
	4. Printer	2	√			
	6. Genset	1	√			
	7. Meja Kerja	13	√			
	8. Lemari Arsip	5	√			
	9. Meja rapat	-				Belum ada
	10. Kursi kerja	13	√			
	11. Kursi rapat	40	√			

2.3. KINERJA PELAYANAN

Dua tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Solor Selatan sejak berdirinya pada Tahun 2010 terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2010 s/d 2011, meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
3. Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan
4. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran serta evaluasi capaian kinerja
5. Terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan
6. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada masyarakat
7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan

Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Solor Selatan

Kabupaten Flores Timur

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Prosentase tersedianya administrasi perkantoran					100 %					100 %					100 %
2	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur					100 %					100 %					100 %
3	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran					100 %					100 %					100 %
4	Prosentase tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan					100 %					100 %					100 %
5	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat					100 %					100 %					100 %
6	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan					100 %					100 %					100 %
7	Prosentase terpenuhinya kegiatan yang dilaksanakan dengan baik					100 %					100 %					100 %

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Solor Selatan
2007 s/d 2011

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	-	-	-	-	369.000.000	-	-	-	-	369.000.000	-	-	-	-	0 %	-	-
Belanja Langsung	-	-	-	-	166.288.000	-	-	-	-	166.288.000	-	-	-	-	0 %	-	-
Belanja Pegawai	-	-	-	-	10.200.000	-	-	-	-	10.200.000	-	-	-	-	0 %	-	-
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	119.163.000	-	-	-	-	119.163.000	-	-	-	-	0 %	-	-
Belanja Modal	-	-	-	-	36.925.000	-	-	-	-	36.925.000	-	-	-	-	0 %	-	-

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan dan permasalahan mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;
7. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
8. Wilayah Kabupaten Flores yang luas dan terdiri pulau-pulau serta masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
9. Keberadaan Pusat Pemerintahan atau Pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
10. Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
11. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana (program dan kegiatan) dan akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
12. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
13. Income perkapita masyarakat masih rendah;
14. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;

15. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM/NGO) dan Negara Donor dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
7. Tersedianya potensi pertanian, peternakan dan perkebunan

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
KECAMATAN SOLOR SELATAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan SKPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi “agak mandul”. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Dan bahkan pernah muncul wacana untuk menghilangkan kecamatan dari struktur pemerintahan karena dianggap tidak diperlukan lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi “agak mandul”. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati. Berbagai kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan belum sepenuhnya direalisasikan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri, harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Solor Selatan, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat

Permasalahan yang akan dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Solor Selatan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik	Belum optimal	Optimal dan tepat	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat	Ketersediaan dana dan sarana prasarana	Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik yang belum optimal
Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintahan desa/kelurahan	Belum optimal	Optimal dan tata kelola pemerintahan di desa yang baik	Kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat serta konsistensi pendampingan	Ketaatan dan konsistensi serta sinergitas program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan yang belum optimal
Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.	Belum optimal dan sinergis	Optimal dan sinergis	Profesionalitas aparatur dan jalinan kerjasama yang dibangun	Dukungan dan sinergitas pelaksanaan program	Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan

					yang belum optimal dan sinergis.
1	2	3	4	5	6
Tingkat Partisipasi	Rendah	tinggi	Kehandalan aparaturnya dalam meningkatkan partisipasi	Globalisasi dan teknologi	Tingkat Partisipasi masyarakat yang masih rendah
Kohesi sosial masyarakat	Berkurang	tinggi	Pendekatan yang humanis dan profesionalitas aparaturnya	Solidaritas dan semangat gotongroyong	menurunnya tingkat kohesi sosial masyarakat
Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	Berkurang	tinggi	semangat anti KKN yang dimiliki aparaturnya	Tindakan penegakkan hukum terhadap pelaku KKN yang memberi efek jera bagi para pelakunya	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran	Belum optimal	Optimal, cepat dan tepat sasaran	Ketersediaan aparaturnya dan sarana prasarana pendukung, SOP dan tanpa KKN	Koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan	Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran yang belum optimal
Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Belum optimal	Optimal dan kesejahteraan meningkat	Kewenangan Kecamatan dan merencanakan dan mengelola program pemberdayaan ekonomi serta	Program pemberdayaan yang yang menyentuh masalah dan kebutuhan masyarakat serta pendanaan dan pendampingan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah dan tidak disertai dengan pendanaan yang minim
Pelanggaran hukum;	tinggi	Rendah	Penegakkan hukum tanpa diskrimnasi	Penegakkan hukum tanpa diskrimnasi oleh aparaturnya penegak huku tingkat atas	Tingginya angka pelanggaran hukum dan penegakkan hukum masih diskriminatif;
Income perkapita masyarakat	Rendah	Tinggi	Pendampingan dan kemampuan mengelola potensi yang dimiliki	Pemanfaatan potensi dan pengolahan serta pemasaran produksi	Income perkapita masyarakat yang masih rendah
Demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;	Belum optimal	Demokratis dan etis	Ketaatan terhadap regulasi dan keterbukaan komunikasi baik formal maupun informal	Etika demokrasi dan pemahaman terhadap demokrasi	Pengabaian etika demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;

Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat	Rendah	Tinggi	Ketersediaan dan kapasitas aparatur yang cukup memadai	Moratorium penerimaan PNS dan terbatasnya perekrutan tenaga kontrak	Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat yang masih rendah
1	2	3	4	5	6
Derajat Kesehatan masyarakat	Rendah	tinggi	Perhatian dan minat aparatur yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Ketersediaan dan perhatian para aparatur medis dan paramedis serta ketersediaan sarana prasarana	Derajat Kesehatan masyarakat yang masih rendah
Kemiskinan dan pengangguran	Tinggi	Rendah	Adanya perhatian yang serius terhadap penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran	Angka ketergatalan, program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta terbatasnya pendanaan program penanggulangannya

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	(1) Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan beberapa lembaga Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	
2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	Good governance dan clean government menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	(2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan serta pemberlakuan e-KTP	
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	
4	Meningkatnya kerjasama antara negara	Partisipasi masyarakat menjadi isu yang sangat kuat dalam berbagai regulasi perencanaan di tingkat pusat	(4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	

3.2. TELAAHAN VISI – MISI dan PROGRAM KERJA KEPALA DAERAH dan WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur adalah

" Terwujudnya Manusia dan Masyarakat Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing "

Visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Maju dan Sejahtera** ; Mengandung makna bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Flores Timur akan mengalami peningkatan kualitas hidup yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan seperti meningkatnya pendapatan per kapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya jaminan sosial, meningkatnya tingkat pendidikan dan pemanfaatan teknologi, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu dan antar kelompok masyarakat, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi potensial di daerah, serta semakin berkembangnya nilai – nilai humanis yang positif dan produktif
2. **Bermartabat** ; adalah kondisi manusia dan masyarakat Flores Timur yang dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraannya sepanjang lima tahun ke depan, senantiasa mengedepankan nilai-nilai luhur budaya Lamaholot yang menjadi prinsip dasar kehidupan dan prasyarat untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan, yakni kejujuran dan integritas, pemerataan dan keadilan, solidaritas, cinta kasih, demokrasi, kepastian hukum dan keadilan gender.
3. **Berdaya Saing** ; adalah kondisi manusia dan masyarakat Flores Timur selama lima tahun ke depan dapat mengupayakan percepatan tingkat kemajuan dan kesejahteraannya yang melampaui kecepatan tumbuh rata-rata daerah-daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pengukuran indikator-indikator pembangunan daerah.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Kabupaten Flores Timur, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. **Mengembangkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*** dengan berorientasi pada pelayanan prima melalui penerapan tata cara kerja yang profesional, transparan, sinergi antara sektor dan *stakeholders*, penegakan hukum serta penataan sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berbasis pemanfaatan keunggulan teknologi informasi (*e-government*);
2. **Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Flores Timur** dengan menyediakan akses kepada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan bermutu, menegakan tertib hidup berdasarkan nilai-nilai sosial budaya lamaholot serta memfasilitasi dan mendukung pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Kesejahteraan Rohani);
3. **Meningkatkan pengembangan infrastruktur strategis penunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan mitigasi bencana alam.**
4. **Mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan manusia dan masyarakat Flores Timur** melalui gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat dimana Koperasi menjadi "Jantung" dalam suatu kerjasama yang sinergis dengan Badan Usaha Milik Daerah dan unit-unit usaha swasta yang saling menguntungkan dalam berbagai aktivitas ekonomi rakyat (Kesejahteraan Lahiriah);
5. **Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.**

Sebagai salah satu SKPD, maka Kantor Kecamatan Solor Selatan berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Namun demikian dalam pelaksanaannya selama ini belum didukung dengan adanya anggaran dan sarana prasarana yang memadai, hal ini tampak

dalam anggaran yang dikelola sebagaimana telah dipaparkan didepan. Dengan modal semangat dan kerja sama selama ini pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan meskipun dengan hasil yang belum optimal.

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: " Terwujudnya Manusia Dan Masyarakat Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat Dan Berdaya Saing "				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 :	Mengembangkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance dan Clean Government		
	1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal	Keterbatasan dana serta efektivitas pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal	Adanya dukungan dana dalam pelayanan administrasi perkantoran
	2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan publik	Keterbatasan dana pengadaan sarana prasarana dan biaya operasional	Adanya dukungan dana dalam penyediaan sarana prasarana aparatur serta adanya komitmen meningkatkan kinerja pelayanan publik
	3.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rendahnya kapasitas dan etos kerja aparatur kecamatan	Pendidikan aparatur yang masih rendah dan minimnya diklat	Adanya komitmen akan adanya profesionalitas aparatur dalam memberikan pelayanan
	4.Program Peningkatan	Tindakan	pemberlakuan	Adanya regulasi

	Disiplin Aparatur	indisipliner apartur yang masih tinggi	rewards and punishment yang belum berjalan baik	yang terkait dengan disiplin aparat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaksanaan evaluasi kinerja serta pelaporan yang belum optimal	Pengendalian dan evaluasi yang belum didukung dengan data yang baik serta kurangnya pengawasan dan kontrolling	Tersedianya sarana teknologi dan tuntutan peningkatan kinerja pelayanan publik
	6. Program Peningkatan Pelayanan Publik	Pelayanan publik yang belum optimal	Kurangnya dukungan kapasitas SDM, Sarana prasarana, dan SPM dan SOP	Tingginya tuntutan pelayanan publik yang berkualitas dan mudah

3.3 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033); maka Kecamatan Solor Selatan yang baru terbentuk pada tanggal 12 Januari 2010 belum ditetapkan Tata Ruang Wilayah dan Satuan Wilayah Pengembangan. Kriteria sistem perkotaan, Kecamatan Solor Selatan belum termasuk PKL karena belum memenuhi salah satu atau semua kriteria sebagai kawasan perkotaan, yakni berpotensi atau berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa-jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan dan berpotensi atau berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Kota PKL terdiri atas : Kota PKL-1 yaitu Kota Larantuka sebagai ibukota Kabupaten , Kota PKL-2 yaitu ibukota kecamatan yang berkedudukan sebagai pusat SSWP dan Kota PKL-3 yaitu meliputi seluruh kota– kota ibukota kecamatan di Kabupaten .

Berdasarkan hierarki kawasan perkotaan tersebut, maka kecamatan Solor Selatan belum ditetapkan sebagai kawasan perkotaan kecamatan yang tidak memiliki fungsi sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya, maka perkotaan kecamatan tersebut tetap merupakan wilayah inti bagi desa-desa sekitarnya pada tingkat kecamatan. Wilayah perkotaan kecamatan ini juga harus memberikan pelayanan sosial-ekonomi minimal sampai tingkat wilayah administrasi kecamatan itu sendiri seperti halnya wilayah yang berfungsi sebagai pusat SSWP dan jenis pelayanan sosial ekonomi yang seharusnya ada pada masing-masing pusat kecamatan atau ibukota di kecamatan ini diantaranya yaitu pendidikan (tingkat SLTP), kesehatan (tingkat puskesmas) dan sebagainya.

Sesuai dengan penetapan orde/ hierarki perkotaan untuk wilayah Kabupaten Flores Timur, serta konsep dan strategi pengembangan, maka sistem tata ruang di Kabupaten Flores Timur dibagi menjadi 5 Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Namun untuk Kecamatan Solor Selatan dalam Sub satuan Wilayah Pengembangan.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pelayanan publik, dalam upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Solor Selatan maupun Visi dan Misi pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu Kantor Kecamatan Solor Selatan perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

3.4.1 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan	Kelemahan
1. Uraian tugas yang jelas 2. Adanya pedoman dan juknis 3. Kesadaran akan tupoksi masing-masing 4. Dukungan Sumber Daya Manusia, Fasilitas Penunjang (Peralatan/Perlengkapan), Dukungan Finansial : Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Flores Timur, Tugas Pembantuan dan dukungan dana NGO Internasional (khususnya dalam mengembangkan potensi), yang cukup memadai. 5. Adanya Perangkat Peraturan Daerah yang mendukung, antara lain : Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada camat. 6. Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat.	1. Ketersediaan SDM yang minim dan tidak didukung dengan adanya kompetensi yang memadai berimplikasi pada ketidakseimbangan beban kerja dengan tuntutan capaian kinerja; 2. Minimnya alokasi anggaran dan belum diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan. 3. Sarana prasarana kantor kurang memadai 4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik-turun). 5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik. 6. Belum adanya (diberlakukannya) rewards maupun punishment terhadap aparatur kecamatan maupun aparatur desa yang melakukan pelanggaran; 7. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah atas maupun pemerintah desa dalam memberikan pelayanan; 8. Pelimpahan wewenang kepada Camat yang belum optimal; 9. Perilaku masyarakat belum mendukung program 10. Semakin lemahnya koordinasi perencanaan hingga evaluasi pembangunan dan pelayanan publik lainnya sebagai akibat dari perbedaan pemahaman terhadap otonomi yang memberi kewenangan yang luas kepada pemerintahan kabupaten dan kota.

Peluang	Tantangan
1. UU No. 32 Th. 2004 dan perubahannya. 2. Adanya kebijakan Pemkab yang mendukung pemberdayaan kecamatan.	1. Kapasitas aparatur desa yang masih rendah 2. Potensi SDA yang belum tergali. 3. Kondisi geografis yang kering dan demografis

3. Adanya program utama "Gerbang Emas"	(jumlah penduduk) yang besar.
4. Adanya bintek/diklat /sosialisasi peraturan yang diadakan pemkab	4. Masih tingginya keluarga miskin dan pengangguran
5. Kemajuan teknologi.	5. Berada pada jalur jalan negara dan dekat ibukota kabupaten sehingga rawan kamtibmas.
6. Adanya perhatian pemerintah pusat sampai kabupaten terhadap Pembangunan di desa dan Daerah Tertinggal/Daerah (adanya program PNPM maupun program dari dana Tugas Pembantuan lainnya).	6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan (program dan kegiatan) dan pelayanan publik;
7. Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah RI dengan Negara Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia maupun penggalian dan pemanfaatan potensi yang dimiliki.	7. Daya beli yang rendah dan biaya pembangunan dan pelayanan publik yang tinggi sebagai akibat karakteristik wilayah kecamatan Demon Pagong, yang sebagian wilayah masih terisolasi fisik.
8. Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	

3.4.2 Isu-Isu Strategis

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical success faktor dengan membagi kedalam 4 (empat) strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Solor Selatan yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggressive.

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

- 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubernur NTT (Anggur Merah) dan Bupati Flores Timur (Gerbang Emas).
- 2) Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi.
- 3) Memanfaatkan/menerapkan kewenangan yang dimiliki serta dukungan dana yang ada untuk mengoptimalkan kapasitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana yang ada.

- 4) Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparat desa serta melakukan rewards dan punishment.
 - 5) Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalain kerjasama, koordinasi dan sinkrenisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.
 - 6) Mengembangkan kemampuan pegawai untuk pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
- b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
- 1) Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintah desa.
 - 2) Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah.
 - 3) Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)
- 1) Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor.
 - 2) Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah
 - 3) Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bintek yang ada
 - 4) Memanfaatkan program “anggur merah” dan “gerbang emas” serta PNPM untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
 - 5) Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
- 1) Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman

- 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi Kecamatan Solor Selatan, strategi yang sesuai adalah strategi agresive; artinya pihak kecamatan harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Solor Selatan lima ke tahun ke depan, adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah desa
3. Memanfaatkan program “Anggur Merah” , “Gerbang Emas” PNPM serta program intervensi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
4. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
5. Mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
6. Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta , Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalain kerjasama, koordinasi dan sinkrenisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada
7. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada

pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

8. Pelayanan Prima yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI KECAMATAN SOLOR SELATAN

Kecamatan Solor Selatan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Flores Timur terdiri dari 7 desa. Dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Solor Barat.
- Selatan : Laut Sawu.
- Timur : Kecamatan Solor Timur
- Barat : Kecamatan Solor Barat.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Solor Selatan di desa Kalike; namun untuk sementara berkantor di desa Kalike Aimatean, sambil menunggu penyelesaian pembangunan gedung Kantor Camat.

Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten Flores Timur kira – kira 4 Km (transportasi darat) dan 16 mil (transportasi laut).

Kondisi jalan raya cukup mendukung pelaksanaan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan untuk 6 desa. Sedangkan untuk desa Sulengwaseng sedang dalam pengerjaan.

Luas wilayah Kecamatan Solor Selatan 31,58.Km².

Topografi wilayah Kecamatan Solor Selatan : dengan kemiringan diatas 30 derajat

Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Solor Selatan keadaan 31 Desember 2011; sebanyak : 5.352 Jiwa , terdiri dari : laki – laki : 2.330 Jiwa dan Perempuan : 3.022. Jiwa.

Dengan kondisi wilayah kecamatan Solor Selatan yang demikian, dapat memberikan sedikit gambaran dalam penentuan strategi perencanaan pembangunan.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis

instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Visi Kecamatan Solor Selatan dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 – 2016 yaitu :

“ Terwujudnya Manusia dan Masyarakat Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat Dan Berdaya Saing ”.

Berdasarkan pada visi Kabupaten Flores Timur di atas, visi Kecamatan Solor Selatan ditetapkan sebagai berikut :

Pelayanan publik yang prima dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Artinya Pelayanan Publik yang diselenggarakan didukung oleh sumber daya aparatur yang menguasai keseluruhan tugas dan fungsi. Pelayanan Publik dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebagai berikut :

1. Profesional dalam pelayanan :

Pelayanan publik yang diselenggarakan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan publik akomodatif dan responsif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat berkualitas dan sejahtera.

2. Didukung oleh Sumber Daya Manusia yang unggul :

Kecamatan Solor Selatan sebagai lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakat secara intensif dan menyeluruh dan harus mampu bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan.

3. Mendukung kebijakan pembangunan daerah:

Pelayanan publik harus tetap pada kerangka dan arah kebijakan pembangunan daerah guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dengan tetap mempertimbangkan unsur keadilan dan demokratisasi.

4. Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Cepat, Akurat dan Legal :

Profesionalisme pelayanan publik dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan dilaksanakan menganut prinsip Good Governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses pelayanan publik dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

5. Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkelanjutan :

artinya perlu dilakukan evaluasi yang diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan yang hasilnya dapat dijadikan sebagai alat ukur perbaikan yang akan selalu diterapkan di masa mendatang.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Kecamatan Solor Selatan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pelaku pembangunan di tingkat kecamatan dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu Misi Kecamatan Solor Selatan dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi , rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.**
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berpegang pada prinsip Pemerintahan yang Baik dan Bersih.**

Penjelasan masing-masing misi sebagai berikut:

Misi Kesatu :

Pihak kecamatan adalah perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mengedepankan pada

pendekatan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Misi Kedua :

Sebagai “motor” penggerak pembangunan di tingkat kecamatan, SDM aparatur pembangunan menjadi sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kualitas pelayanan publik sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para penyelenggara pemerintahan baik secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Penerapan prinsip Pemerintahan Yang Baik dan Bersih akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan maupun pelaksanaan program-program pembangunan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PEMERINTAH KECAMATAN SOLOR SELATAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan; Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Solor Selatan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Solor Selatan

Misi 1 :	Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi , rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.							
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -				
			2011	2012	2013	2014	2015	2016

Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan prima	Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, akurat dan legal	Kondisi pelayanan, kenyamanan kantor, dan pelayanan administrasi yang cepat, akurat dan legal.	55%	60%	65%	70%	75%	80%
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berpegang pada prinsip Good Governance and Clean Government								
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -				
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan umum	55%	60%	65%	70%	75%	80%
Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data, informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan data, informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik secara baik, cepat dan akurat	• Tersedianya dokumen Renstra, Renja, LAKIP, LPPD dan Dokumen Laporan Keuangan	55%	60%	65%	70%	75%	80%

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh kecamatan, guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Kecamatan Solor Selatan, strategi yang ditempuh adalah :

a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

- 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubernur NTT (Anggur Merah) dan Bupati Flores Timur (Gerbang Emas).
- 2) Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi.

- 3) Memanfaatkan/menerapkan kewenangan yang dimiliki serta dukungan dana yang ada untuk mengoptimalkan kapasitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana yang ada.
- 4) Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparatur desa serta melakukan rewards dan punishment.
- 5) Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalankan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.
- 6) Mengembangkan kemampuan pegawai untuk pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)

- 1) Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintah desa.
- 2) Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah.
- 3) Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

- 1) Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah
- 3) Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bintek yang ada
- 4) Memanfaatkan program “anggur merah” dan “gerbang emas” serta PNPM untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
- 5) Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

- 1) Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

Berdasarkan analisis strategi di atas, maka strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pemerintah kecamatan Solor Selatan, sebagai berikut :

Tabel 4.2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : "Pelayanan Publik Yang Prima Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dan Berkelanjutan"				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.	Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan prima	Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, akurat dan legal.	Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparat desa serta melakukan rewards dan punishment.	Memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparat desa serta melakukan rewards dan punishment.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berpegang pada prinsip pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi.	Mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk kecamatan dan swadaya
	Optimalisasi pengelolaan dan	Meningkatnya pengelolaan dan	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, LAKIP,	Pelayanan dan pengolahan data

	pemanfaatan data, informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	pemanfaatan data, informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik secara baik, cepat dan akurat	LPPD dan Dokumen Laporan Keuangan	serta perencanaan dengan sistem informasi
--	---	---	-----------------------------------	---

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Solor Selatan.

Rincian Prioritas Program dan kegiatan indikatif dapat diikuti pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

Dan Pendanaan Indikatorif

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Perencanaan pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																					
Meningkatkan kemampuan pelayanan masyarakat dalam pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan legal	Kondisi	Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp																																																																																																					
																					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																				
																																						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																																				
																																																						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																			
																																																																							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																		
																																																																																								100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																	
																																																																																																									100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																							
Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi	Penyediaan jasa komunikasi																																																																																																					
Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan	Perencanaan dan pembinaan																																																																																																					
Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor	Penyediaan alat-alat kantor																																																																																																					
Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor																																																																																																					
Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko	Cetak Blanko																																																																																																					

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Kecamatan Solor Selatan sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 5 (lima) tahun mendatang, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Pelayanan administrasi penunjang kelancaran pelaksanaan tugas	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
2	Dokumentasi Surat Masuk dan Keluar	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
3	Pembayaran Rekening Telpn, Air dan Listrik	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
4	Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
5	Pengadaan suku cadang/BBM	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
6	Tenaga Administrasi Keuangan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
7	Pengadaan alat-alat kebersihan kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
8	Alat Tulis Kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
9	Cetak Blanko	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
11	Fotocopy	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
12	Pembelian alat/komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
13	Langganan Koran Harian	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
14	Pembelian Buku Peraturan Perundangan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
15	Konsumsi Rapat dan Tamu	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
16	Jml Rapat Koordinasi/Konsultasi yang diikuti dan dilaksanakan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%

17	Jml Rapat Koordinasi/Konsultasi yang diikuti dan dilaksanakan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
18	Jml Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
19	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
20	Pengadaan laptop	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
21	Pengadaan komputer	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
22	Pengadaan printer	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
23	Pengadaan meja dan kursi kerja	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
24	pengadaan gordena	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
25	kursi rapat	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
26	Lemari arsip	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
27	Pengecatan dan perbaikan gedung kantor	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
28	- Service Komputer	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
29	- Service Printer	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
30	- Service Laptop	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
31	- Service genset	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
32	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
33	Dokumen Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, RENJA, RENSTRA	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
34	Dokumen Laporan Keuangan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%
35	Dokumen Laporan Keuangan	60 %	64%	68%	72%	76%	80%	80%

BAB VII

PENUTUP

Dengan telah disepakatinya visi, misi dan tujuan Kecamatan Solor Selatan yang terangkum dalam Rencana Strategis ini, Kecamatan Kecamatan Solor Selatan berkomitmen untuk melaksanakan semua kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis ini. Komitmen ini dilandasi dengan nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju serta dilandasi janji dan niat sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki.

Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten Flores Timur Tahun 2011-2015 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kecamatan Solor Selatan. Komitmen, niat dan janji yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) yang ada pada tiap bidang. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan visi dan misi organisasi Kantor Camat Kecamatan Solor Selatan yang telah ditetapkan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Kecamatan Solor Selatan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikianlah dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Solor Selatan Tahun 2012-2016 ini dibuat, untuk dipedomani dan diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dan clean goverment.

Kalike, 2012

Pj. Camat Solor Selatan,

Yoseph Damian Klodor, S.Sos

NIP. 19660220 199903 1 003